

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia selama dekade terakhir mencerminkan proses yang dinamis, diwarnai dengan perbedaan kemajuan antarwilayah yang masih cukup besar. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi regional. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Indonesia pada periode 2015-2022 rata-rata mencapai 4,9% per tahun, meskipun pada 2020 sempat menurun tajam menjadi -2,1% akibat pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi menunjukkan peran penting kebijakan fiskal daerah dan investasi dalam mendukung stabilitas ekonomi (Nur et al., 2025). Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional.

PMTB berfungsi sebagai indikator utama investasi fisik suatu daerah yang mencerminkan akumulasi barang modal untuk kegiatan produksi di masa depan. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar kapasitas ekonomi daerah dalam menghasilkan output baru. Investasi yang berkelanjutan melalui PMTB berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas (Fitrianasari et al., 2022). Namun, perkembangan PMTB antarprovinsi di Indonesia masih tidak merata. Provinsi dengan basis industri kuat seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur memiliki proporsi PMTB yang jauh lebih tinggi dibanding provinsi di wilayah timur Indonesia (BPS, 2023). Ketimpangan ini menandakan pentingnya peran kebijakan fiskal daerah untuk mendorong pemerataan investasi di seluruh wilayah.

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menstimulasi aktivitas ekonomi. (Rahmanda et al., 2025) menegaskan bahwa belanja daerah yang terarah, efisien, dan produktif mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan

infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Namun, efektivitas belanja daerah bergantung pada kualitas perencanaan dan implementasi anggaran di tingkat pemerintah daerah. (Agusta & Arianti, 2023) menyatakan bahwa meskipun anggaran meningkat setiap tahun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu signifikan karena masih adanya ketidakefisienan birokrasi. Dalam konteks ini, hubungan antara belanja daerah dan PMTB menjadi penting untuk diteliti secara empiris, khususnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memainkan peran penting dalam memperkuat daya saing ekonomi suatu wilayah. IPM menggambarkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. (Naila et al., 2023) menegaskan bahwa peningkatan IPM akan memperbesar kapasitas manusia untuk berinovasi, sehingga dapat menarik investasi dan meningkatkan PMTB. (Ali & Septiana, 2022) juga menemukan bahwa daerah dengan IPM tinggi, seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta, memiliki tingkat investasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan IPM rendah. Namun, kajian yang menghubungkan IPM dengan PMTB lintas 34 provinsi Indonesia masih terbatas, padahal hubungan keduanya berpotensi kuat dalam menjelaskan ketimpangan pembangunan regional.

Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor lain yang berpengaruh terhadap pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan PDRB menggambarkan peningkatan kapasitas ekonomi dan produktivitas yang dapat menciptakan permintaan baru terhadap barang modal. (Fitrianasari et al., 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas aktivitas investasi fisik. Namun, (Tampubolon et al., 2022) menemukan bahwa respons PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada struktur ekonomi lokal. Misalnya, daerah dengan basis industri manufaktur lebih cepat menyerap modal dibandingkan daerah yang bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan.

Keterkaitan antara belanja daerah, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap PMTB mencerminkan sinergi antara kebijakan fiskal, pembangunan manusia, dan dinamika investasi. (Siregar & Rizky, 2022) membuktikan melalui model *error*

correction mechanism bahwa hubungan antara IPM dan PMTB bersifat jangka panjang, meskipun tidak selalu signifikan dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi kebijakan yang konsisten antara pemerintah pusat dan daerah agar dampak fiskal dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pendekatan integratif yang meneliti ketiga variabel ini secara simultan akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap mekanisme pembangunan di tingkat regional.

Meskipun banyak penelitian membahas pengaruh variabel ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagian besar masih fokus pada satu variabel atau satu wilayah tertentu. (Agusta & Arianti, 2023) hanya meneliti hubungan antara IPM, PMTB, dan belanja langsung di Jawa Tengah, sementara Della (Puspita & Athoillah, 2024) meneliti pengaruh faktor sosial ekonomi di Jawa Timur. Studi berskala nasional yang menggunakan 34 provinsi masih jarang dilakukan, padahal penting untuk memahami variasi spasial dan temporal antarwilayah. Dengan cakupan nasional dan periode 2015-2022, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih lengkap mengenai dinamika pembangunan daerah di Indonesia.

Selain keterbatasan wilayah, studi-studi terdahulu juga banyak yang belum menganalisis hubungan simultan antara belanja daerah, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap PMTB. Sebagian penelitian hanya menyoroti pengaruh belanja terhadap pertumbuhan (Rahmanda et al., 2025) atau IPM terhadap PDRB (Naila et al., 2023). Padahal, PMTB berperan sebagai jembatan antara investasi dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, integrasi ketiga variabel ini dalam satu model analisis dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai interaksi antarindikator pembangunan daerah.

Masalah ketimpangan ekonomi antarprovinsi juga menjadi latar penting penelitian ini. Berdasarkan data BPS (2023), IPM di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan signifikan; DKI Jakarta mencatat nilai tertinggi sebesar 81,65, sedangkan Papua hanya 61,39. (Nur et al., 2025) menjelaskan bahwa perbedaan ini menunjukkan belum meratanya hasil pembangunan dan kualitas pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah dengan IPM rendah umumnya memiliki kapasitas

fiskal yang terbatas, sehingga dampak belanja daerah terhadap PMTB relatif kecil. Ketimpangan ini menimbulkan tantangan bagi kebijakan desentralisasi fiskal untuk memastikan pemerataan pembangunan.

Fifiyanti & Maryati, (2025) menemukan bahwa belanja modal dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, tetapi belum mengkaji pengaruh langsung terhadap pembentukan modal tetap sebagai outcome pembangunan ekonomi yang lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman empiris dengan menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap PMTB. Penelitian lintas provinsi dengan periode 2015-2022 akan memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif mengenai determinan utama pembentukan modal di Indonesia. Selain itu, pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel akan membantu mengidentifikasi efek spesifik waktu dan wilayah terhadap investasi.

Kebijakan fiskal daerah yang efektif tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran, tetapi juga pada arah penggunaannya. (Rahmanda et al., 2025) menekankan bahwa komposisi belanja modal dan belanja publik harus diarahkan untuk mendorong produktivitas ekonomi dan investasi swasta. (Fitrianasari et al., 2022) menambahkan bahwa sinergi antara belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta dapat menciptakan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan PMTB bukan hanya hasil dari belanja pemerintah, tetapi juga hasil dari interaksi kebijakan dan partisipasi ekonomi lokal.

Dalam konteks kebijakan pembangunan manusia, IPM memiliki peran strategis sebagai penguat daya saing daerah. Peningkatan IPM mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya mempercepat laju akumulasi modal (Naila et al., 2023). Daerah yang memiliki SDM berkualitas lebih mudah menarik investasi karena memiliki tenaga kerja terampil dan berdaya saing. (Ali & Septiana, 2022) juga menekankan pentingnya kualitas sosial dan modal manusia sebagai faktor penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi prasyarat penting untuk memperkuat hubungan antara belanja publik dan PMTB.

Secara empiris, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan PMTB bersifat dua arah. Pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan investasi, dan sebaliknya, investasi meningkatkan kapasitas produksi yang memperkuat pertumbuhan (Tampubolon et al., 2022). Namun, kestabilan hubungan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal dan efisiensi pengeluaran pemerintah. Daerah yang memiliki perencanaan fiskal baik dan tingkat efisiensi belanja tinggi cenderung lebih cepat memanfaatkan momentum pertumbuhan untuk mendorong investasi fisik (Nur et al., 2025). Oleh karena itu, analisis panel lintas provinsi menjadi penting untuk menangkap variasi antarwilayah tersebut.

Secara akademik, penelitian ini berupaya memperkaya literatur empiris tentang ekonomi pembangunan daerah di Indonesia dengan menggunakan data panel 34 provinsi selama 2015-2022. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi efek jangka pendek dan jangka panjang secara simultan, yang tidak dapat ditangkap oleh model *cross-section* biasa (Ali & Septiana, 2022). Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model empiris yang mengintegrasikan faktor-faktor fiskal dan pembangunan manusia terhadap investasi daerah (Agusta & Arianti, 2023). Dengan demikian, hasilnya diharapkan memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi kebijakan publik.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi alokasi anggaran yang lebih efektif dan berbasis bukti. (Fitrianasari et al., 2022) menegaskan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal daerah dan pembangunan manusia akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan empiris penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi evaluasi kinerja APBD dalam mendukung investasi produktif. Dengan memahami interaksi antara belanja publik, IPM, dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat PMTB.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik kebijakan fiskal daerah di Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif dengan data panel lintas provinsi, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik tetapi juga manfaat

praktis dalam perencanaan pembangunan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat sinergi antara belanja publik, pengembangan SDM, dan investasi fisik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan yang merata antarprovinsi, terutama terkait pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator utama investasi daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, ketimpangan antarwilayah masih tinggi, dipengaruhi oleh variasi Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan investasi dan kapasitas produksi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto di provinsi-provinsi Indonesia dalam kurun waktu 2015-2022?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Objek penelitian hanya mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2015-2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dokumen publikasi pendukung lainnya serta dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif melalui regresi data panel. Penelitian ini tidak membahas faktor lain di luar variabel tersebut maupun aspek kebijakan dan kelembagaan daerah secara kualitatif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman empiris dan analisis mengenai hubungan antara variabel makroekonomi dan pembentukan modal tetap bruto di Indonesia. Tujuan-tujuan spesifik penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pembentukan modal tetap bruto di provinsi-provinsi Indonesia selama periode 2015-2022.
- 2) Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pembentukan modal tetap bruto di seluruh provinsi Indonesia.
- 3) Menganalisis pengaruh laju produk domestik regional bruto terhadap pembentukan modal tetap bruto di Indonesia.
- 4) Menguji seberapa pengaruh simultan antara Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto di tingkat provinsi selama periode 2015-2022 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika investasi daerah di Indonesia.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang relevan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tingkat provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi pengembangan keilmuan ekonomi pembangunan maupun sebagai bahan pertimbangan praktis dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan modal tetap bruto di tingkat provinsi. Dengan mengkaji pengaruh belanja daerah, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), dan laju Produk Domestik Regional Bruto secara simultan, penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai peran kebijakan fiskal dan pembangunan manusia dalam mendorong investasi di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah dan perencanaan pembangunan manusia guna mendorong pembentukan modal tetap bruto secara berkelanjutan.

3) Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan studi lanjutan dengan cakupan wilayah, periode, maupun variabel yang luas guna memperdalam pemahaman dinamika pembangunan ekonomi daerah.

